

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Trust-Politik Policy merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang diusung oleh Park Geun-Hye sebagai presiden wanita pertama Korea Selatan pada periode 2013-2016. *Trust-Politik Policy* adalah tentang bagaimana membangun kepercayaan sebagai cara untuk mempromosikan kerja sama institusional pada level yang lebih tinggi dan kolaborasi yang diharapkan kedepannya bisa mencapai level bangsa antar kawasan.¹ Hal ini sesuai dengan pidato Park saat pelantikannya sebagai Presiden Korea Selatan pada 25 Februari 2013.²

The “era of happiness for the people” that I dream of is one that ushers in an era of happiness on the Korean Peninsula and indeed throughout the global village.

We will build even more solid ties of trust with the United States, China, Japan, Russia and other countries of Asia and Oceania by reducing tension and conflict to build peace and cooperation in Asia. (President Park Geun-hye, Inaugural Address, February 25, 2013)

Berdasarkan pidato tersebut Park ingin mewujudkan era kebahagiaan bagi seluruh masyarakat di Semenanjung Korea dan bagi seluruh masyarakat global. Di mana Park ingin membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan azas kepercayaan seperti dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Rusia dan berbagai negara di Asia dan Ocenia dengan menurunkan tensi konflik yang ada agar bisa membangun perdamaian dan kerja sama di Asia maupun dunia.

Dengan kepemimpinan Park Geun-Hye, Park menerapkan kebijakan luar negeri yang cukup berbeda dengan kebijakan pemimpin sebelumnya.³ Di mana kebijakan *Trust-Politik* sangat mengedepankan konsep “*trust*” dalam setiap

¹ South Korean Ministry of Foreign Policy, “Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative”, hal. 1

² Ibid

³ Yun Byung-se, “Park Geun-hye’s Truspolitik: A New Framework for South Korea’s Foreign Policy”, *Global Asia* 8, No. 3, (2013), hal. 10

proses yang akan dijalankan. *Trust* menurut Park sebagai sebuah inti nilai terhadap keseluruhan filosofi politik yang menjadi aset yang dibutuhkan dalam membantu pengembangan kerja sama tidak hanya antar individu tapi juga antar bangsa.⁴ Selain itu, *trust* didefinisikan sebagai aset dan sarana umum untuk kerja sama internasional serta sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam menciptakan perdamaian yang nyata.⁵ Perdamaian tanpa konsep *trust* merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena kesungguhan dalam proses *trust* membutuhkan waktu dan pendekatan secara bertahap dan konsisten.⁶

Kebijakan luar negeri “*Trust-Politik policy*” Korea Selatan terdiri atas tiga kerangka besar yaitu *Trust-building Process on the Korean Peninsula*, *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* dan *Eurasia Initiative*⁷. Pertama, *Trust-building Process on the Korean Peninsula* adalah suatu cara untuk membangun kepercayaan antara Korea Selatan dengan Korea Utara dan pergerakan hubungan antar Korea yang didasari keamanan yang kuat dalam tatanan internasional untuk mencapai perdamaian akhir di Semenanjung Korea dan harapan unifikasi kedepannya. Hal ini sesuai dengan pidato Park Geun-hye saat pelantikannya menjadi Presiden Korea Selatan pada 25 Februari, 2013.⁸

“Through a trust-building process on the Korean peninsula, I intend to lay the groundwork for an era of harmonious unification where all Koreans can lead prosperous and free lives and where their dreams can come true. I will move forward step-by-step on the basis of credible deterrence to build trust between the South and the North. Trust can be built through dialogue and honoring promises that have already been made. It is my hope that North Korea

⁴ Seong-ho Sheen, “*Dilemma of South Korea’s Trust Diplomacy and Unification Policy*”, *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol.23, No. 2014, hal. 104

⁵ Yun Byung-Se, hal. 11-12.

⁶ *Ibid*

⁷ South Korean Ministry of Foreign Affairs paper, “*Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative*”, hal. 5

⁸ South Korea’s Ministry of Unification paper, *Trust-Building Process on the Korean Peninsula*, 2013, hal.2

will abide by international norms and make the right choice so that the trust-building process on the Korean peninsula can move forward."(President Park's Inaugural Address, February 25, 2013)

Berdasarkan pidato di atas melalui kebijakan *trust-building process on the Korean Peninsula*, Park ingin menetapkan dasar untuk mewujudkan era unifikasi yang harmonis di mana semua masyarakat Korea bisa hidup makmur dan bebas sehingga bisa mewujudkan impian mereka. Selain itu, Park ingin secara bertahap ingin membangun kepercayaan di Semenanjung Korea yang didasari pencegahan dari segala tindakan provokatif oleh Korea Utara. Menurut Park, *trust* bisa dibangun melalui dialog dan perjanjian yang telah ada sebelumnya sehingga nantinya Korea Utara bisa menerima norma-norma internasional dan bisa mengambil pilihan yang tepat dalam menjalankan pemerintahan.

Kerangka yang kedua yaitu, *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI) merupakan proses dialog yang bertujuan untuk membangun kepercayaan antar bangsa di Asia Timur Laut dengan memperkuat kebiasaan untuk dialog dan kerja sama dengan mengedepankan isu-isu non tradisional kemudian secara bertahap pada pengembangan lingkup kerja sama. Kebijakan ini coba diusung oleh Korea Selatan karena ketiadaannya tindakan-tindakan yang efektif dalam mencari sumber konflik yang ada di regional seperti isu teritori serta munculnya ancaman baru bersama tentang isu lingkungan dan pemanfaatan energi seperti halnya energi nuklir. Di mana hal tersebut menghalangi upaya-upaya untuk memaksimalkan penuh potensi untuk pengembangan regional.⁹

⁹ South Korean Ministry of Foreign Affairs paper, "Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative", hal. 9

Kerangka kebijakan Korea Selatan Ketiga, *Eurasia Initiative* merupakan inisiatif kerjasama dan strategi nasional yang besar yang diajukan oleh Korea Selatan guna bisa mencapai kemakmuran berkelanjutan dan perdamaian di Eurasia (Eropa dan Asia).¹⁰ Berdasarkan salah satu poin kebijakan ini, Korea Selatan melihat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan merupakan hambatan besar dalam membangun kerja sama. Oleh karena itu permasalahan ancaman tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar bisa menghantarkan pada era baru Eurasia. Hal ini sesuai dengan masalah perdamaian yang terjadi di Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea bukan hanya penting untuk Korea Utara-Korea Selatan, regional, maupun Eurasi tapi juga bagi seluruh masyarakat dunia. Korea Selatan menyadari kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi antar negara untuk menjalin kerja sama. Jadi pemerintah Korea Selatan berusaha berjuang untuk membangun Semenanjung Korea yang damai dan Eurasia sebagai “Benua Perdamaian.”¹¹

Berdasarkan tiga kerangka kebijakan *Trust-Politik* dapat dilihat bahwa permasalahan keamanan di Semenanjung Korea yang diakibatkan oleh aktivitas pengembangan nuklir dan tindakan provokatif oleh Korea Utara merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlunya ada antisipasi untuk bisa meredam ataupun menghentikan tindakan Korea Utara, khususnya bagi Korea Selatan sebagai negara terdekat. Hal ini sejalan dengan kebijakan *Trust-Politik* yang muncul berdasarkan pengalaman sejarah Semenanjung Korea serta kesulitan dalam menebak realitas keamanan di mana terdapat penurunan tingkat

¹⁰ South Korean Ministry of Foreign Affairs paper, “Eurasia Initiative”, hal. 4

¹¹ Ibid, hal. 6

kepercayaan yang jelas antar negara di Semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut.¹²

Meningkatnya ketidakpastian tingkat keamanan di Semenanjung Korea beberapa dekade sebelumnya, ditambah perbedaan ideologi dan buruknya sejarah hubungan Korea Selatan-Korea Utara menjadikan kedua negara berkonflik serta sulit untuk akurat dan bekerja sama. Hal ini menjadikan kedua negara berusaha memaksimalkan pertahanan dan keamanan negara agar terhindar dari dominasi satu sama lainnya. Korea Utara dengan kondisi domestik negara yang sulit berupaya mengembangkan nuklir sebagai prioritas nasionalnya agar bisa menjamin keamanan dan mencapai kepentingan nasional. Disisi lain Korea Selatan tetap berfokus pada pengembangan kerja sama ekonomi, pertahanan dan keamanan agar bisa menghadapi provokasi-provokasi dari Korea Utara.¹³

Korea Utara yang berambisi untuk menjadi negara nuklir guna bisa meningkatkan *prestise* dan *bargaining power*. Pengembangan nuklir atau proliferasi nuklir¹⁴ di bidang persenjataan ini bertentangan dengan tujuan damai penggunaan nuklir untuk pemenuhan kebutuhan energi. Proliferasi nuklir dibidang persenjataan dapat mengancam stabilitas keamanan dunia, keamanan negara dan menyebabkan situasi yang rawan akan konflik.¹⁵ Hal ini menjadikan ancaman keamanan lebih beragam dan meningkatkan ketidakpastian keamanan

¹² Seong-ho Sheen, hal. 105

¹³ Angga Saputra dan Idjang Tjarsono, "Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam Menghadapi Konflik Dengan Korea Utara (2006-2012)", hal. 2

¹⁴ Proliferasi nuklir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan akan energi ataupun kebutuhan lainnya seperti untuk kebutuhan energi, industri, pertanian ataupun persenjataan seperti saat sekarang ini. Sumber dari: Wisnu Arya Wardhana, *Teknologi Nuklir: Proteksi Radiasi dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007), hal. 263

¹⁵ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional", *Jurnal Universitas Wahid Hasyim*, Vol. 7 No. 2, (2010), hal. 3

dalam komunitas internasional seiring proliferasi nuklir dari ancaman transnasional.¹⁶

Korea Utara pada awalnya mulai mengembangkan nuklir yang dibantu oleh Uni Soviet dengan membangun reaktor nuklir kecil, dan seiring berjalannya waktu terus berkembang dan menjadi perhatian dunia internasional.¹⁷ Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir dan misil balistik jarak jauh secara konsisten. Korea Utara hingga saat sekarang dinyatakan telah mampu mengembangkan nuklir pada level yang lebih mematikan lagi dari pada sebelumnya. Hal ini coba dinyatakan oleh Korea Utara saat berhasil melakukan uji coba nuklir pada Januari 2016 yaitu uji coba bom hidrogen.¹⁸ Di mana uji coba tersebut merupakan uji coba nuklir yang keempat setelah sebelumnya pada tahun 2006, 2009, dan 2013. Selain itu, Korea Utara juga telah mampu mengembangkan rudal balistik yang diduga mempunyai daya jangkau 6000-1000 km dengan nama *Taepodong-2*.¹⁹

Aktivitas Korea Utara ini tentunya menimbulkan ancaman dan mengganggu stabilitas keamanan internasional karena secara terang-terangan mengembangkan nuklir untuk menjadi senjata agar bisa mengamankan negara dan mengancam negara lainnya. Meskipun Korea Utara banyak mendapatkan

¹⁶South Korea National Defense White Paper, http://www.mnd.go.kr/user/mnd_eng/upload/pblicitn/PBLICTNEBOOK_201308130553561260.pdf hal 12 (diakses pada 5 September 2016)

¹⁷ Ica Wulansari, "Pengaruh Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara Terhadap hubungan dengan Jepang", hal. 1

¹⁸ CNN, North Korea Claims it has H-Bomb as U.N. Discusses Human Rights Abuses, <http://edition.cnn.com/2015/12/10/asia/north-korea-thermonuclear-claim/>, (diakses pada 8 April 2016)

¹⁹ Defense Policies of Countries paper, Security Environment Surrounding Japan, ch. 2, hal. 62

desakan dunia internasional dan sanksi dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB), namun Korea Utara tetap melanjutkan aktivitas proliferasi nuklirnya.

Perkembangan persenjataan nuklir yang pesat serta seringnya provokasi senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menjadikan Korea Selatan merasa terancam akan hal tersebut. Hal ini tentu coba direspon oleh Korea Selatan agar bisa mengamankan negara serta mencegah ancaman dari provokasi Korea Utara. Korea Utara yang telah lama merespon agresivitas Korea Utara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tentunya telah banyak berdampak terhadap naik turunnya tensi hubungan kedua negara. Di mana puncak penurunan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara terlihat pada era kepemimpinan Lee Myung-bak. Lee yang menerapkan kebijakan yang cenderung konfrontatif membuat hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah mulai membaik pada era Kim Dae-Jung dan Roh Myu-hun berubah secara drastis pada saat kepemimpinan Lee.

Dengan kepemimpinan Park Geun-Hye dengan kebijakan luar negerinya *Trust-Politik*. Korea Selatan diharapkan mampu menghadapi provokasi-provokasi dari Korea Utara seperti uji coba nuklir dan provokasi lainnya. Dalam situasi ketidakstabilan di Semenanjung Korea, dengan konsep kebijakan *Trust-Politik* Park berusaha menyelesaikan dua tantangan isu keamanan tentang rivalitas antar duo-Korea dan rivalitas di Asia Timur Laut. Seperti pada konsep *trust building process* berfokus pada dua hal yaitu pertama harus memastikan keamanan yang didasari ketegasan dan postur keamanan yang pasti guna bisa melawan berbagai bentuk provokasi dari Korea Utara. Kedua, membangun kepercayaan dan juga mengkritisi dinamika keamanan di Asia Timur Laut, di

mana perbedaan tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi dan faktor sejarah serta konflik yang masih mengelilingi isu-isu teritori yang masih intensif.²⁰

Meskipun tidak jauh berbeda dari konsep yang diusung oleh Kim Dae-jung sebagai Presiden Korea Selatan tiga periode sebelumnya dengan '*Sunshine Policy*'²¹ yang juga mengemukakan dialog maupun diplomasi untuk menjalin hubungan dengan Korea Utara yang kemudian dilanjutkan oleh Roh Moo-hyun.²² Melalui konsep *trust*, Park percaya akan sangat membantu dalam mengembangkan kerja sama maupun dalam setiap proses dialog ataupun negosiasi yang ingin dilakukan dengan Korea Utara kedepannya.²³ Kebijakan Korea Selatan dengan *Trust-Politik* yang cukup berbeda dengan Lee Myung-bak sebagai Presiden Korea Selatan sebelumnya yang cenderung konfrontatif membuktikan bahwasanya Park berupaya untuk bisa mendekati Korea Utara dan memperbaiki hubungan kedua negara.²⁴

Dengan adanya perubahan serta modifikasi konsep kebijakan luar negeri oleh Park Geun-hye dengan kepemimpinan sebelumnya tidak lantas membuat tensi hubungan kedua negara menurun, namun juga memasuki tensi level yang baru dengan semakin meningkatnya rasa ketidakpercayaan antara satu sama lain. Berbagai bentuk provokasi senjata nuklir serta naik turunnya tensi hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, selalu direspon Park Geun-hye secara tenang dengan lebih mengutamakan upaya melalui dialog dan negosiasi. Park

²⁰ Seong-ho Sheen, hal. 105-106

²¹ *Sunshine Policy* adalah kebijakan penyatuan secara *de facto* melalui lebih banyak kontak dan kerja sama antara Korea Utara dan Korea Selatan daripada penyatuan sistem dan hukum (*de jure*). Sumber dari: Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'ood, "Masyarakat, Politik dan Pemerintahan (KOREA)", 2003, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

²² Haikal Hasan Thalib, "Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan Dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara Antara Tahun 2002-2012", (Paper., Universitas Udayana) hal.6-7

²³ Seong-ho Sheen, hal. 105-106

²⁴ Stephanie Nayoung Kang, Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trust-politik for Inter-Korean Relations, *Pacific Forum CSIS*, hal. 3-4

melalui kebijakan *Trust-Politik* percaya, bahwa kebijakan tersebut bisa memperbaiki hubungan dengan Korea Utara serta menurunkan tensi konflik yang ada.²⁵ Di mana melalui konsep *Trust-Politik* ini bisa mewujudkan upaya perbaikan hubungan dengan Korea Utara dan bisa menurunkan aktivitas nuklir dikemudian hari. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, di sini peneliti ingin lebih melihat mengapa Park Geun-hye menerapkan kebijakan luar negeri yang baru sebagai upaya menurunkan agresivitas serta bisa meredam provokasi senjata nuklir Korea Utara. Melalui kebijakan *trust-Politik*, Park berharap nantinya mampu mewujudkan penurunan agresivitas serta provokasi nuklir Korea Utara dan sekurangnya memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan di Semenanjung Korea saat ini menjadikan Korea Utara dan Korea Selatan bersaing untuk memaksimalkan kapabilitas keamanan negaranya agar bisa terhindar dari dominasi satu sama lain. Hal ini menjadikan kedua negara berupaya untuk mencari cara untuk menjamin keamanan dan pertahanan negaranya. Korea Selatan melalui aliansi kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara lebih memilih mengembangkan persenjataan nuklir untuk bisa menjaga pertahanan keamanan negara dan mencapai kepentingan nasionalnya. Aktivitas serta agresivitas Korea Utara dan intensitas provokasinya dirasa cukup mengancam dunia internasional terkhusus bagi Korea Selatan sebagai rival terdekat. Hal ini berusaha direspon oleh Korea Selatan dengan menerapkan kebijakan *Trust-Politik*. Di mana melalui kebijakan ini, Korea Selatan berharap bisa menghadapi

²⁵ Seongwhun Cheon, hal. 3

provokasi-provokasi serta agresivitas nuklir sehingga nantinya bisa mengamankan negaran dan Semenanjung Korea.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah **“Mengapa Korea Selatan menerapkan *“Trust-Politik Policy”* sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara ?**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebijakan *“Trust-politik”* diterapkan Korea Selatan sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, peneliti sebagai penstudi Hubungan Internasional bisa mengetahui serta memahami dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan serta dampak hubungan kedua negara terhadap stabilitas keamanan dunia khususnya di Semenanjung Korea. Sehingga nantinya peneliti bisa menambah bekal keilmuan serta wawasan dan diharapkan bisa berkontribusi untuk bidang keilmuan Hubungan Internasional kedepannya.
2. Peneliti berharap penelitian ini sebagai langkah awal untuk keberlanjutan peneliti dalam meneliti dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, sehingganya nanti bisa berkontribusi untuk menambah referensi bagi para akademisi Hubungan Internasional.

1.6 Studi Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengambil beberapa studi pustaka untuk menghimpun data dari berbagai sumber seperti karya ilmiah, buku maupun jurnal ilmiah. Untuk sumber data penelitian disesuaikan dengan judul penelitian mengenai alasan mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan *Trust-politik* dalam upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara.

Studi pustaka yang pertama adalah tulisan dari Seong-ho Sheen yang berjudul "*Dilemma of South Korea's Trust Diplomacy and Unification Policy*".²⁶ Dalam tulisan ini membahas mengenai kepemimpinan Park Geun-hye sebagai Presiden Korea Selatan dengan moto '*Trust-Politik*' dimana Park berfokus dengan menerapkan kebijakan *trust-diplomacy* di Semenanjung Korea. Kebangkitan Tiongkok sebagai *major power* di Asia menyebabkan situasi keamanan semakin memburuk dengan semakin meningkatnya agresivitas Korea Utara menggunakan senjata nuklir untuk mencapai kepentingan nasional dan menjamin keamanan negaranya. Korea Selatan sebagai negara terdekat dengan Korea Utara berusaha membendung serta membangun stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dengan menggunakan kebijakan *trust-diplomacy* dimana Park berusaha memaksimalkan kerja sama multilateral yang berbasis '*trust*'.

Menggunakan moto *trust-politik*, Park berusaha mewujudkan *trust-building process* dan *the initiative for peace* guna bisa memperbaiki hubungan dengan Korea Utara serta kerja sama dan unifikasi nantinya. Untuk membalas provokasi serta agresivitas dari Korea Utara, Park lebih memilih untuk berdialog dan menurunkan rasa permusuhan dan curiga terhadap Korea Utara. Dalam

²⁶ Seong-ho Sheen, hal 97-122

mewujudkan tercapainya kebijakan *trust-diplomacy* di Semenanjung Korea, Park menyatakan banyak mengadopsi serta mentransformasi kebijakan dari kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya, namun hal itu tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan Korea Utara. Korea Utara menganggap kebijakan dari Park itu seperti jebakan dan tipuan bagi Korea Utara nantinya.

Studi pustaka yang ke dua yaitu tulisan dari Sung-Chool Lee yang berjudul “*The ROK-U.S. Joint Political and Military Response to North Korean Armed Provocations*”.²⁷ Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Korea Selatan sebagai salah satu negara yang mengalami kemajuan pesat saat ini baik dari segi ekonomi dan militer aktif berperan untuk merespon serta membendung agresivitas serta provokasi dari Korea Utara. Secara geopolitik Semenanjung Korea memiliki posisi yang strategis tentunya menjadikan banyak negara *superpower* seperti Amerika Serikat berusaha menanamkan pengaruhnya guna bisa mempermudah akses dan menyebarkan pengaruhnya di benua Asia. Korea Selatan dengan aliansinya Amerika Serikat aktif merespon setiap provokasi militer ataupun non-militer Korea Utara guna bisa mencegah dari serangan Korea Utara serta untuk pemulihan status quo. Sementara respon dengan tujuan sanksi atas provokasi Korea Utara oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui forum-forum atau kelembagaan internasional berpotensi meningkatkan tensi konflik yang terjadi.

Korea Utara secara perlahan mengakui bahwa sistem politik mereka gagal dibandingkan dengan Korea Selatan, tapi mereka menyadari bahwa ini satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan militernya. Secara militer Korea

²⁷ Sung-Chool Lee, “*The ROK-U.S. Joint Political and Military Response to North Korean Armed Provocations*”, 2011, CSIS (Center for Strategic International Studies), hal 1-30

Utara jauh lebih unggul dari Korea Selatan dengan mengembangkan senjata pemusnah masal / *weapon mass destruction* (WMD), sistem operasi militer serta kapal selam perang. Hal ini ditujukan guna bisa memprovokasi Korea Selatan pada saat yang diperlukan dan bisa mencegah dari invasi dari negara lain nantinya.²⁸

Studi pustaka yang ke tiga tulisan dari Seongwhun Cheon yang berjudul “*Trust- the Underlying Philosophy of the Park Geun-hye Administration*”.²⁹

Untuk mengkaji kebijakan pemerintahan Korea Selatan yang dipimpin oleh Park Geun-hye, penulis berangkat dari dinamika konflik yang terjadi di Semenanjung Korea atau dikenal dengan “*Asia Paradox*”. *Asia Paradox* ditandai dengan jatuhnya tensi seperti penolakan Korea Utara sebagai negara yang memiliki senjata nuklir, kebangkitan sejarah dan tensi teritorial dan percepatan kompetisi militer. Kata “*trust*” menjadi kunci dalam kebijakan luar negeri yang diusung oleh Park Geun-Hye. Kata *trust* bertujuan sebagai pondasi untuk mendapatkan dukungan penuh dari domestik seperti berbagai golongan masyarakat yang ada serta seluruh perangkat pemerintahan. Tidak hanya itu konsep *trust* juga berfungsi dalam Hubungan Internasional seperti kebijakan luar negeri Korea Selatan. *Trust-politik policy* sendiri memiliki tiga pilar dari konsep *trust* dalam hubungan internasional yaitu *Strong Deterrence/defense, Trust Diplomacy, and the Korean Peninsula Trust Process*.

Dengan konsep *trust process* dalam menjalin hubungannya dengan Korea Utara, Korea Selatan ingin menciptakan pergantian substansial pada Korea Utara. *Trust process* juga merupakan sebuah alat untuk mencapai *Three Stage*

²⁸ Sung-Chool Lee, hal. 8

²⁹ Seongwhun Cheon, hal. 1-5

Unification yang dikemukakan Park. Tiga *stage* tersebut yaitu, menjamin keamanan, melaju melalui integrasi ekonomi, dan terakhir mencapai integrasi politik. Didasari oleh komitmen yang kuat untuk identitas nasional, demokrasi, kebebasan, dan ekonomi pasar dan sikap tegas pertahanan. Park akan menjaga jendela dialog terbuka dan berdasarkan kenyamanan, di mana hal itu dilakukan dengan Korea Utara secara terbuka. Park sangat berfokus pada penderitaan yang dirasakan rakyat Korea Utara dan bersedia untuk memberi bantuan kemanusiaan untuk peluang kerjasama dan perbaikan hubungan kedua negara. Inilah setiap poin yang berbeda dengan *sunshine policy*.

Studi pustaka yang ke empat yaitu tulisan tentang “*The North Korean Nuclear Crisis*” yang ditulis oleh Paul Leventhal dan Steven Dolley.³⁰ Korea Utara pada awalnya mengembangkan nuklir atas kerja sama dan bantuan Uni Soviet dalam membangun reaktor nuklir kecil serta mendapatkan bantuan untuk pengembangan lebih lanjut setelah itu dari Tiongkok. Hal ini ditujukan guna bisa mengimbangi kekuatan kerja sama dan aliansi dari Korea Selatan dengan Amerika Serikat serta bisa untuk menjamin keamanan dan mencegah invasi pihak luar nantinya. Korea Utara memiliki beberapa alasan untuk mempertahankan program proliferasi nuklirnya yaitu, alasan untuk mencapai *unique status*, dan didasarkan atas sejarah invasi serta agresi militer Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah karena nuklir, sehingga nuklir dianggap sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai berbagai kepentingan nasional. Aktifnya keterlibatan Korea Selatan dan aliansinya untuk menghentikan program proliferasi nuklir Korea Utara melalui kelembagaan internasional seperti

³⁰ Paul Laventhal dan Steven Dolley, *The North Korean Nuclear Crisis, Medicine & Global Survival* 1994, Vol. 1, No. 3, hal 1-12

International Atomic Energy Association (IAEA), Non Proliferation Treaty (NPT) dan lainnya menjadikan Korea Utara semakin agresif dan sulit diprediksi dalam melakukan tindakan agresifitas maupun provokasinya.

Studi pustaka yang ke-lima yaitu tentang “*Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*”³¹, yang ditulis oleh Andi Purwono dan Ahmad Syaifudin Zuhri. Tulisan ini memandang nuklir dimanfaatkan Korea Utara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang dianggap sulit tercapai jika tidak menggunakan cara yang koersif. Agresivitas Korea Utara dalam pengembangan nuklir untuk persenjataannya dimulai pasca kemerosotan ekonomi karena pemutusan hubungan mitra kerja sama ekonomi dengan Uni Soviet. Sikap Korea Utara yang agresif menyebabkan banyak mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Atas pengembangan nuklirnya Korea Utara diminta bergabung dengan *Non Proliferation Treaty (NPT)* serta mematuhi PBB dengan adanya inspeksi dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Korea Utara memutuskan keluar dari NPT karena ketiadaan nuklir dianggap tidak bisa menjamin negaranya aman dari invasi dari pihak luar. Selain itu Korea Utara juga melanggar kesepakatan *Six Party Talks* antara enam negara di mana termasuk Korea Utara dan Korea Selatan sebagai anggotanya.

Korea Utara memiliki beberapa alasan untuk tetap mempertahankan pengembangan nuklirnya, seperti dengan alasan *regime survive*, ekonomi dan keamanan. Pertama *regime survive*, bagaimana cara Korea Utara bertahan dalam tatanan dunia internasional yang didominasi oleh *superpower* seperti Amerika

³¹ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, *Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2, (2010) hal. 1-19

Serikat. Kedua ekonomi, Korea Utara menjadikan nuklir sebagai instrumen untuk memeras negara lain atau pihak-pihak yang menentanginya. Dengan adanya *nuclear deterrence* bisa menjamin keamanan negara serta keberlangsungan ekonomi negaranya. Ketiga keamanan, Korea Utara menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi koersif guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan bisa mengarahkan Korea Utara dengan pihak-pihak yang menentanginya dalam perundingan demi jaminan keberlangsungan di negaranya.

Dari kelima studi pustaka diatas, perbedaan penelitian yang diatas dengan yang penelitian yang ingin diteliti yaitu lebih melihat kepada alasan mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan *trust-politik* sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara. Lima studi pustaka diatas memiliki setiap perbedaan fokus dalam masalah yang menjadi kajiannya. Jadi dengan penelitian ini diharapkan bisa merangkap setiap fokus kajian isu dari studi pustaka diatas guna bisa menjawab pertanyaan penelitian yang ingin diteliti.

1.7 Landasan Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

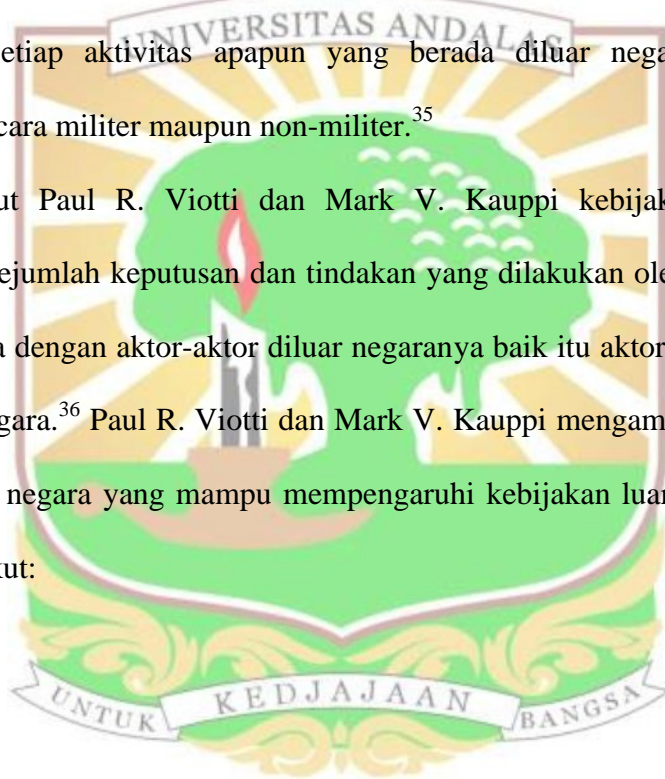
Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi atau tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk menghadapi negara lain atau unit-unit politik internasional di mana hal tersebut berujung untuk tercapainya kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara akan menjalin hubungan kerja sama bilateral, trilateral maupun multilateral.³² Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri sebagai upaya negara melalui sikap dan

³² Yanyan Mochamad Yani, Politik Luar Negeri, 2007, hal. 3

aktivitas dalam mengatasi permasalahan ataupun keuntungan yang identiknya berada di luar suatu negara.³³

Seiring perkembangannya kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasionalnya, kebijakan luar negeri berkembang kepada bagaimana upaya untuk mempertahankan, melindungi rezim kekuasaan serta mengamankan negara.³⁴ Semakin tingginya ketidakpastian akan jaminan keamanan pada saat sekarang ini menjadikan setiap negara berupaya untuk selalu siaga dan waspada dalam menyikapi setiap aktivitas apapun yang berada diluar negaranya baik itu provokasi secara militer maupun non-militer.³⁵

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi kebijakan luar negeri merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh negara dalam hubungannya dengan aktor-aktor diluar negaranya baik itu aktor negara maupun aktor non negara.³⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menggambarkan tindakan dan perilaku negara yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri. Seperti gambar berikut:



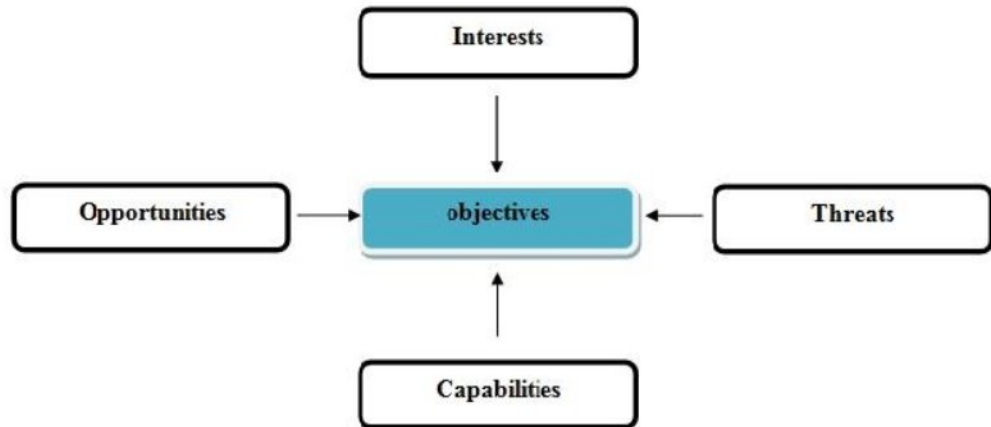
³³ James N. Rosenau, *The Study of Political Adaptation* (London: Frances Pinter Publishers Limited, (1981), hal. 47

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, Allyn and Bacon: London, 1999, hal. 478

Gambar 1.1 :
Understanding State Behavior



Sumber: Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations: World Politics*, Fifth Edition, 2013, hal. 187

Berdasarkan kerangka gambar diatas, Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu: kepentingan, tujuan, ancaman, peluang, kebijakan dan kemampuan.³⁷

1. *Interest*

Interest atau kepentingan merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam suatu negara atau disebut juga dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara, kepentingan nasional dalam bentuk dasarnya terdiri atas: menjaga keberlangsungan hidup (*survival*), menciptakan dan meningkatkan vitalitas ekonomi dan kemakmuran, dan penerapan nilai-nilai (*value*) yang dianut oleh suatu negara.

³⁷ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations: World Politics*, Fifth Edition, 2013, hal. 187-210

Pertama, menjaga kelangsungan hidup (*survival*) merupakan kepentingan vital sebuah negara. Menjaga kelangsungan hidup sebagai sebuah negara menyiratkan pemeliharaan status kedaulatan sebuah negara. Pelaksanaan kedaulatan adalah hak yang diklaim oleh negara untuk menerapkan dominasi, power ataupun otoritas internal dan eksternal agar bisa menjalankan politik luar negerinya secara mandiri. Kedua, menciptakan dan meningkatkan vitalitas ekonomi dan kemakmuran merupakan suatu hal penunjang utama untuk memaksimalkan *power* dalam suatu negara. Ketiga, penerapan nilai-nilai (*value*) yang merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam struktur dan fungsi dari sistem politik suatu negara.

2. *Objectives*

Objectives atau tujuan merupakan apa yang menjadi kepentingan nasional sebuah negara yang masih begitu umum, sehingga para pembuat keputusan biasanya akan menentukan tujuan yang lebih spesifik lagi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Permasalahan pertahanan merupakan suatu hal yang utama dalam kepentingan nasional sebuah negara. Selain itu kepentingan nasional mengarahkan kebijakan dalam memilih berbagai tujuan seperti halnya pada isu politik, ekonomi, dan sosial.

3. *Threats*

Threats atau ancaman mempengaruhi tujuan dari sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya seperti halnya ancaman yang berasal dari luar negaranya maupun sistem internasional. Ketika ancaman dirasa datang pada suatu negara, perlunya bagi negara tersebut untuk

menghindari setiap ancaman yang datang baik itu ancaman secara militer maupun non-militer. Setiap ancaman dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan diambil suatu negara tergantung bagaimana negara tersebut mengkonversi ancaman tersebut.

4. *Opportunities*

Opportunities atau peluang juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, di mana dari setiap ancaman yang datang pada sebuah negara ada peluang yang bisa dilihat dan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Perlunya bagi suatu negara untuk memaksimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya agar bisa mengurangi permasalahan ataupun mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

5. *Capabilities*

Capabilities atau kemampuan merupakan unsur terakhir yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri, di mana kemampuan negara tersebut untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang telah dibuat. Kemampuan sangat berhubungan dengan kekuasaan (*power*), dimana konsep kekuasaan relatif sebagai distribusi kemampuan yang dapat dilihat berdasarkan perspektif global. Hal ini bisa terlihat pada pendistribusian kekuasaan antara kekuatan besar dalam sistem internasional baik itu distribusi unipolar, bipolar maupun multipolar. Distribusi kemampuan memungkinkan kita untuk memprediksi pola dasar perilaku dalam politik internasional. Pendistribusian kemampuan membuat persaingan antar

negara dan mempengaruhi bagaimana negara-negara dengan kemampuan menengah untuk juga bertindak dan bereaksi.

Capabilities (kemampuan), terdiri atas *political capabilities* (sumber daya manusia, teknologi komunikasi, reputasi/prestise, sistem pemerintah, dan budaya), *socio and cultural capabilities*, *geographic and economic capabilities*, *military capabilities*. Semua unsur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kemampuan sebuah negara tergantung bagaimana negara tersebut dalam memanfaatkan dan mengeksploitasinya untuk memaksimalkan kemampuannya.

Berdasarkan kerangka gambar di atas yang dikemukakan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, di dalam pembuatan kebijakan luar negeri semua unsur dari gambar tersebut saling berhubungan. Dimana setiap unsur akan berujung pada tujuan-tujuan dasar dari suatu negara yaitu keamanan negara dan hal-hal yang lebih spesifik seperti pada bidang politik, ekonomi, dan sosial serta penerapan nilai-nilai yang dianut negara.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang ingin dibuat harus mengacu pada metode penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah dan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan guna bisa menjawab permasalahan penelitian yang ingin diteliti.³⁸

Untuk mempermudah peneliti dalam menulis, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang

³⁸ Suryana, "Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hal. 10

menekankan pada pemahaman dan interpretasi terhadap serangkaian informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan tujuannya penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, hal ini guna bisa menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui penggunaan teori dan konsep-konsep dalam menjelaskan fenomena.³⁹ Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai alasan mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan *Trust-Politik* sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk bisa menganalisis penelitian ini dengan baik, peneliti menentukan batasan waktu guna mempermudah proses penelitian. Batasan waktu yang diambil peneliti disini dalam menganalisis mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan *Trust-Politik* sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara pada tahun 2013-2016. Alasan pemilihan 2013 karena merupakan awal diterapkannya kebijakan *Trust-Politik* yang diusung oleh Park Geun-hye sebagai Presiden Korea Selatan menggantikan kepemimpinan Lee Myung-bak sebelumnya. Sedangkan tahun 2016 dipilih oleh penulis sebagai batasan akhir penelitian karena pada hingga sekarang masih terpantau melakukan aktivitas pengembangan nuklir untuk persenjataannya. Selain batasan tahun tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan peneliti juga membahas literatur sejarah hubungan kedua negara pasca perang di Semenanjung Korea serta bagaimana dinamika hubungan kedua negara hingga saat sekarang untuk bisa mendukung data penelitian ini.

³⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Pusat Antar Universitas– Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES: Yogyakarta, 1990), 261-286.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisa merupakan suatu unit yang perilakunya ingin di deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Unit analisa disini disebut juga dengan variabel dependen.⁴⁰ Sedangkan unit eksplanasi merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis atau bisa disebut juga sebagai variabel independen. Kedua variabel ini saling mempengaruhi, atau bisa juga disebut variabel independen sebagai variabel penyebab dan variabel dependen disebut juga sebagai variabel akibat.⁴¹ Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, unit analisis penelitian ini adalah negara yaitu Korea Selatan. Sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya adalah agresivitas nuklir Korea Utara.

Tingkat analisis merupakan area untuk menjelaskan unit-unit sesuai dengan koridornya. Selain itu tingkat analisis akan membantu peneliti sejauh mana tingkat analisa dibutuhkan. Tingkat analisis dari penelitian ini berada pada tingkat negara. Karena penelitian ini lebih melihat kepada negara Korea Utara dan Korea Selatan sebagai sebuah negara yang berada di kawasan Asia Timur. Pada tingkat analisa negara lebih ditekankan pada perilaku unit negara-bangsa. Hal ini dikarenakan hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara-bangsa.⁴²

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu yang dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data

⁴⁰ Mohtar Mas' oed. hal. 39

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari situs resmi oleh Pemerintah Korea Selatan. Sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

1.8.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah bagaimana peneliti menyampaikan kepada pembaca apa saja yang telah dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sehingga nanti memudahkan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, mencari interpretasi dan kemudian menyimpulkannya.

Dalam menganalisa, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena secara faktual dan kemudian menyajikan penjelasan yang objektif berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Teknik analisa menggunakan kualitatif ini menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis dan kemudian melakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan.

Untuk bisa menjelaskan fenomena mengapa kebijakan *Trust-Politik* yang dipercaya oleh Korea Selatan sebagai upaya untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara. Dalam menggunakan konsep Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dengan melihat perilaku negara sehingga bisa mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri *Trust-Politik* Korea Selatan khususnya terhadap agresivitas nuklir Korea Utara. Berdasarkan konsep ini bisa dilihat unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan yaitu *threats* (ancaman), *interest* (kepentingan), *capabilities* (kemampuan), *opportunities* (kesempatan), dan *objectives* (tujuan). Setelah dilihat apa saja yang

mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan menurut unsur-unsur tersebut barulah dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan akhir dari Korea Selatan untuk mempertahankan dan mengamankan negaranya agar bisa menjaga kelangsungan hidup negaranya serta memperkuat ekonomi negaranya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, landasan teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Agresivitas Nuklir Korea Utara

Pada bab ini berisi tentang sejarah pengembangan nuklir Korea Utara serta bentuk perkembangan nuklir sebagai persenjataan hingga saat sekarang ini.

BAB III Kebijakan Korea Selatan Untuk Menurunkan Agresivitas Nuklir Korea Utara

Pada bab ini menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan Korea Selatan untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara dari masa ke masa hingga masa pemerintahan Park Geun-Hye periode 2013-2016.

**BAB IV Analisis Kebijakan Luar Negeri “Trust-Politik” Korea Selatan
Sebagai Upaya Menurunkan Agresivitas Nuklir Korea Utara**

Pada bab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Korea Selatan melalui *trust-politik policy* khususnya pada salah satu kerangka besarnya *Trust-buiding Process on the Korean Peninsula* sebagai upaya menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara dengan menggunakan konsep yang telah dipaparkan diatas.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini lebih berisikan kesimpulan serta saran dari pembahasan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan.

